

Perspektif Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Modern

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state, the nation's outlook on life, and the national ideology that serves as the main foundation for character formation and the implementation of Indonesian national life. The values of Pancasila have an important function in shaping a civilized, socially just society that upholds the values of divinity, humanity, unity, democracy, and prosperity for all people. This article aims to analyze the perspective of Pancasila values in national and state life through theoretical and conceptual approaches, and to observe their implementation in the realities of modern society. This research shows that Pancasila functions not only as a normative ideology, but also as a practical ideology that is relevant to global developments as long as it is implemented through strengthening character education and legal culture.

Keywords: Pancasila, ideological perspective, implementation of values

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi nasional yang menjadi landasan utama pembentukan karakter dan penyelenggaraan kehidupan nasional Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi penting dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadaban, berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendekatan teoritis dan konseptual, serta melihat implementasinya dalam realitas kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi normatif, tetapi juga ideologi praktis yang relevan dengan perkembangan global selama diterapkan melalui penguatan pendidikan karakter dan budaya hukum.

Kata Kunci: Pancasila, perspektif ideologis, implementasi nilai

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai identitas filosofis bangsa yang menggambarkan

karakter, kepribadian, dan nilai moral yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, serta budaya. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila bukan hanya menjadi idealisme normatif, melainkan juga sebagai nilai operasional yang wajib diterapkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasan, 2024). Pancasila hadir sebagai perekat yang mempersatukan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang terdapat di Indonesia.

Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta kompleksitas kehidupan sosial menuntut adanya penguatan kembali pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti intoleransi, krisis moral, melemahnya solidaritas sosial, dan meningkatnya individualisme menjadi tantangan serius yang harus dihadapi (Kaelan, 2016). Oleh karena itu, pemahaman mengenai perspektif nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting agar Pancasila tidak hanya berhenti sebagai simbol ideologis, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup yang relevan dan kontekstual. Penelitian ini mencoba mengkaji secara konseptual bagaimana nilai-nilai Pancasila dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan menekankan fungsi Pancasila sebagai dasar etika publik.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan filosofis, historis, dan yuridis yang kuat. Secara historis Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI dan disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia (Yudi Latif, 2011). Landasan filosofis Pancasila berakar pada nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menjadi identitas karakter bangsa. Sementara landasan yuridisnya termuat secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945). Secara teoritis Pancasila memiliki tiga kedudukan utama antara lain sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*), sebagai ideologi nasional, dan sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) (Kaelan, 2016). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer Pancasila tidak hanya dipandang sebagai ideologi statis tapi juga sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai fundamentalnya (Notonagoro, 1975). Kajian literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peranan

penting dalam membentuk etika kehidupan bangsa terutama dalam penguatan moralitas publik, integritas politik, dan persatuan nasional. Dalam perspektif pendidikan Pancasila diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun karakter generasi muda melalui internalisasi nilai dan praktik kehidupan sehari-hari

METODE PENELITIAN

1. Metode Empiris

Metode empiris dilakukan dengan cara:

- Observasi lapangan terhadap perilaku toleransi dalam masyarakat.
- Wawancara dengan kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, dan pemangku kepentingan.
- Survei terkait tingkat pemahaman Pancasila dan sikap terhadap perbedaan agama, budaya, serta sosial.

Metode ini digunakan untuk menggambarkan realitas sosial secara faktual, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata dan sejauh mana berpengaruh terhadap toleransi.

2. Metode Normatif

Metode normatif menggunakan:

- Analisis dokumen perundang-undangan terkait Pendidikan Pancasila (misalnya UUD 1945, UU Sisdiknas, dan Perpres Penguatan Pendidikan Karakter).
- Kajian terhadap literatur, buku, dan teori yang membahas Pancasila serta toleransi.
- Pendekatan konseptual untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral bangsa.

Metode ini digunakan untuk mengkaji norma, kaidah, dan nilai dasar Pancasila sebagai sumber toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi negara, dan artikel penelitian yang relevan dengan topik nilai-nilai Pancasila. Penelitian berfokus pada analisis konten untuk menelaah makna filosofis, perspektif ideologis, dan implementasi praktis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu mengolah dan menginterpretasikan data berdasarkan konsep teoretis dan fakta empiris untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran nilai-nilai Pancasila dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi nilai Pancasila di kehidupan sosial tercermin dalam sikap toleransi, kerja sama, solidaritas, dan penghargaan pada keberagaman. Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghormati perbedaan agama, etnis, dan budaya (Kaelan, 2016). Dalam konteks sosial modern meningkatnya ujaran kebencian, konflik identitas, dan intoleransi perlu dihadapi melalui penguatan nilai kemanusiaan dan persatuan.

Dalam bidang politik Pancasila berperan sebagai dasar sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan prinsip permusyawaratan dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menolak liberalisme ekstrem maupun otoritarianisme dan menekankan musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan publik (Budiarjo, 2008). Penerapan nilai demokrasi ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tantangan yang muncul adalah praktik politik uang, polarisasi politik, dan lemahnya etika demokrasi yang dapat merusak prinsip Pancasila.

Dalam perspektif hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan hak di hadapan hukum. Prinsip keadilan sosial menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi dan tanpa memihak kepada golongan tertentu (UUD RI 1945, Pasal 1 Ayat (3).

Namun dalam realitas penyelenggaraan hukum, masih terdapat tantangan seperti ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berlandaskan nilai moral Pancasila yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat utama. Dengan demikian, pemahaman etika hukum berbasis Pancasila perlu diperkuat dalam institusi peradilan dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan keadilan substantif yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembentukan karakter generasi bangsa. Pendidikan Pancasila merupakan instrumen untuk menanamkan nilai religiusitas, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial sejak dini melalui kurikulum dan praktik pembelajaran (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan harus berorientasi bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi terutama pada aspek afektif dan psikomotor, sehingga nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam perilaku nyata.

Penguatan nilai Pancasila dalam pendidikan dapat terwujud melalui keteladanan guru, budaya sekolah yang inklusif, dan pola pembelajaran yang menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan tanggung jawab social (Kemendikbud RI, PPK). Dengan demikian pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat tercermin melalui sikap toleransi, gotong royong, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk memiliki potensi besar untuk hidup harmonis apabila nilai Pancasila dijadikan pedoman utama dalam interaksi sosial. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan etis dalam membangun relasi sosial yang saling menghargai dan menjunjung martabat manusia.

Dalam konteks sosial modern interaksi masyarakat tidak lagi terbatas pada ruang fisik tapi juga ruang digital. Media social sebagai produk globalisasi teknologi sering menjadi arena konflik sosial akibat rendahnya etika komunikasi dan lemahnya internalisasi nilai Pancasila. Fenomena ujaran kebencian, perundungan digital, dan penyebaran hoaks menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan persatuan belum sepenuhnya diperlakukan. Oleh karena itu penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kolektif bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan etika sosial.

Dalam bidang politik Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan demokrasi liberal karena menekankan prinsip musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan kepentingan bersama. Namun praktik politik di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti politik uang, polarisasi politik, dan pragmatisme kekuasaan yang menjauh dari nilai Pancasila.

Dalam perspektif hukum Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan di hadapan hukum. Tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah lemahnya budaya hukum dan integritas penegak hukum. Bidang pendidikan menjadi sarana strategis dalam internalisasi nilai Pancasila. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus menekankan pembentukan sikap dan perilaku. Guru dan dosen berperan sebagai teladan utama.

Tantangan implementasi nilai Pancasila meliputi pengaruh globalisasi, degradasi moral, dan minimnya keteladanan publik. Oleh karena itu diperlukan

strategi penguatan melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, dan literasi digital berbasis nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa memiliki kedudukan yang fundamental dalam membangun arah dan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila bukan sekadar konsep normative melainkan pedoman moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Implementasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial menjadi pondasi utama dalam menjaga keharmonisan sosial serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan ras.

Perspektif terhadap nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk tantangan era globalisasi, modernisasi teknologi, dan perubahan sosial masyarakat. Pancasila menjadi filter ideologis dalam menghadapi arus budaya global yang dapat mengancam identitas dan karakter bangsa. Namun demikian implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan seperti melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya intoleransi, degradasi moral generasi muda, polarisasi politik, serta kurangnya keteladanan dari pemimpin publik. Oleh karena itu revitalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian Pancasila bukan hanya menjadi simbol kenegaraan yang bersifat formal, melainkan harus menjadi ideologi hidup (*living ideology*) yang diwujudkan dalam tindakan konkret sehari-hari. Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan institusi pemerintahan hingga masyarakat luas untuk mewujudkan bangsa yang berintegritas, berkarakter kuat, dan bermartabat.

Selain itu kajian literatur memperlihatkan bahwa penguatan nilai Pancasila tidak hanya menjaga identitas nasional tapi juga memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi secara bijak. Program pendidikan nilai, pembelajaran partisipatif serta integrasi teknologi yang berlandaskan Pancasila menjadi strategi penting agar literasi digital mahasiswa tidak hanya bersifat teknis tapi juga mencerminkan etika dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan memperkuat literasi digital berbasis nilai Pancasila mahasiswa diharapkan mampu menjadi generasi yang kritis, cerdas digital, dan tetap berkarakter kebangsaan di tengah transformasi teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan,Z, Pradhana,R.,F.,Andika,A.P.,&Al Jabbar,M.R.D (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. JALAKOTEK Journal.
- Hasan, Z. (2024). Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan
- Notonagoro. (1975). Falsafah dan Ideologi Pancasila. Jakarta: UI Press.
- Daryanto. Implementasi Pendidikan Karakter Pancasila. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryadharma Ali. Toleransi dalam Perspektif Kebhinnekaan. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- BPIP. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jakarta: BPIP RI.
- Badan Bahasa Kemendikbud. Bahan Ajar Pancasila dan Kewarganegaraan.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tilaar, H.A.R. Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan. Jakarta: Grasindo.

- Syarifudin, A. Pendidikan Pancasila dalam Masyarakat Modern. Bandung: Alfabeta.
- Supardan. Toleransi dalam Perspektif Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Sosial. Gadjah Mada University Press.
- Syamsul Ma'arif. Pendidikan Toleransi: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: LKiS.
- MPR RI. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sekretariat Jenderal MPR.
- Magnis-Suseno, Franz. Etika Sosial: Dasar Moral dalam Kehidupan Bersama. Jakarta: Gramedia.
- Winarno. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Latif, Yudi.(2011).Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Dwi Siswanto. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila. Malang: UM Press.
- Trianto. Desain Pengembangan Pembelajaran Berbasis Karakter. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, Abdul. Wawasan Kebangsaan dan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan. Konsep Kebhinnekaan dan Integrasi Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lickona, Thomas. Educating for Character. New York: Bantam Books.
- Banks, James A. Pluralism and Multicultural Education. Boston: Allyn & Bacon.
- Tilaar, H.A.R. Kebijakan Multikultural dalam Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kemendikbud RI. Buku Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter. Jakarta: Kemendikbud.

BPIP RI. Naskah Akademik Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: BPIP.